Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Vol. 9 No. 4, 2026. pp.760-788. ISSN: 2599-2473
DOI: https://doi.org/10.31538/almada.v9i4.11111

Climate Change Adaptation and Mitigation from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharīʿah: An Analysis of Opportunities and Challenges in the Barurejo Village Community, Banyuwangi

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'Ah: Analisis Peluang dan Tantangan pada Masyarakat Desa Barurejo Banyuwangi

Ahmad Ainun Najib
Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Indonesia
a.ainunnajib@uimsya.ac.id

Received: 19-07-2026 Revised: 10-08-2026 Accepted: 26-09-2026

Abstract

Climate change increases rural vulnerability through shifting seasonal patterns, drought, flooding, pest outbreaks, and declining agricultural productivity. This article examines climate-change adaptation and mitigation measures, their implementation opportunities and challenges, and their relevance from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah in Barurejo Village, Banyuwangi. The study employed a qualitative case-study design. Empirical data were drawn from a focus group discussion on local adaptation and mitigation action planning involving twenty participants representing village government, hamlet leaders, community cadres, women's groups, youth, micro-enterprises, and residents. The data were thematically analysed through familiarisation, coding, theme development, theme review, and interpretation using the dimensions of ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, and ḥifẓ al-bī'ah. The findings show that proposed adaptation measures include using local springs (belik), improving irrigation efficiency, crop diversification, strengthening farmer capacity, and agroforestry. Proposed mitigation measures comprise village greening, reducing chemical fertilisers, adopting organic fertilisers, and composting organic waste. Implementation opportunities derive from natural resources, local ecological knowledge, social capital, and multi-stakeholder collaboration. Challenges include limited awareness and participation, insufficient resources and infrastructure, weak institutional arrangements, and programme discontinuity. From a maqāṣid al-sharī'ah perspective, village climate action protects life, livelihoods, knowledge, future generations, and ecological balance. The article proposes a village climate-action model oriented toward socio-ecological public benefit.

Keywords: *adaptation; climate change; maqāṣid al-sharī'ah; mitigation; rural community.*

Abstrak

Perubahan iklim meningkatkan kerentanan masyarakat desa melalui perubahan pola musim, kekeringan, banjir, peningkatan hama, dan penurunan produktivitas pertanian. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, peluang dan tantangan implementasinya, serta relevansinya dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah pada masyarakat Desa Barurejo, Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data empiris bersumber dari Focus Group Discussion rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan 20 peserta dari unsur pemerintah desa, kepala dusun, kader, PKK, pemuda, pelaku UMKM, dan masyarakat. Data dianalisis secara tematik melalui tahap pengenalan data, pengodean, pembentukan tema, peninjauan tema, dan interpretasi menggunakan dimensi ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-ʿaql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-bīʾah. Hasil menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang dirumuskan meliputi pemanfaatan belik, efisiensi irigasi, diversifikasi tanaman, peningkatan kapasitas petani, dan agroforestri. Strategi mitigasi mencakup penghijauan, pengurangan pupuk kimia, penggunaan pupuk organik, dan pengolahan limbah organik menjadi kompos. Peluang implementasi ditopang oleh sumber daya alam, pengetahuan lokal, modal sosial, dan potensi kolaborasi multipihak. Tantangannya meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta lemahnya kelembagaan dan keberlanjutan program. Dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah, aksi iklim desa merupakan upaya menjaga kehidupan, mata pencaharian, pengetahuan, generasi mendatang, dan keseimbangan lingkungan. Artikel ini menawarkan model aksi iklim desa berbasis kemaslahatan sosial-ekologis.

Kata Kunci: adaptasi; mitigasi; perubahan iklim; maqāṣid al-sharīʿah; masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim tidak lagi hadir sebagai ancaman abstrak yang hanya dibicarakan melalui proyeksi global. Pada tingkat desa, perubahan tersebut dialami melalui ketidakpastian awal musim, kemarau yang lebih panjang, hujan berintensitas tinggi, gangguan terhadap sumber air, peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman, dan penurunan produktivitas lahan. Masyarakat perdesaan berada pada posisi yang rentan karena penghidupan rumah tangga, keamanan pangan, dan ritme sosial-ekonomi mereka masih sangat bergantung pada kestabilan iklim dan ketersediaan sumber daya alam. Penelitian mengenai adaptasi pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap perubahan suhu dan curah hujan memengaruhi pilihan tindakan adaptasi, tetapi kapasitas untuk bertindak juga ditentukan oleh informasi, pengetahuan, akses layanan, dan dukungan kelembagaan.[1]

[1] Andung Bayu Sekaranom et al., "Agricultural Climate Change Adaptation in Kebumen, Central Java, Indonesia," *Sustainability* 13, no. 13 (2021): 7069, https://doi.org/10.3390/su13137069.

Kerentanan tersebut tidak berarti masyarakat desa selalu pasif. Petani dan kelompok lokal mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman panjang dalam membaca musim, mengelola air, memilih tanaman, dan membangun mekanisme saling membantu. Akan tetapi, perubahan iklim dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan penyesuaian yang tersedia. Adaptasi kemudian tidak cukup dipahami sebagai respons individual petani, melainkan sebagai proses sosial yang membutuhkan pembelajaran bersama, infrastruktur, pembiayaan, inovasi, dan kebijakan lokal. Kajian mengenai adaptasi pertanian di Indonesia memperlihatkan bahwa respons yang efektif muncul ketika masyarakat memperoleh ruang partisipasi, akses sumber daya, dan dukungan pemerintah yang sesuai dengan kondisi lokal.[2]

Pendekatan berbasis komunitas menjadi penting karena dampak perubahan iklim selalu berlangsung dalam konteks tertentu. Jenis bahaya, struktur mata pencaharian, relasi sosial, pengetahuan lokal, dan kapasitas pemerintah desa berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Adaptasi berbasis komunitas berupaya menempatkan warga bukan sekadar penerima program, tetapi sebagai pihak yang mengidentifikasi risiko, menentukan prioritas, mengelola sumber daya, dan menilai keberlanjutan tindakan. Meskipun demikian, pendekatan ini dapat gagal apabila partisipasi hanya bersifat simbolik, kelompok rentan tidak terwakili, program bergantung pada pendamping eksternal, atau pembagian tanggung jawab tidak dilembagakan.[3]

Dalam konteks Indonesia, peluang adaptasi berbasis komunitas terletak pada kuatnya modal sosial, pengalaman pengelolaan sumber daya, serta keberadaan berbagai kelompok lokal. Tantangannya mencakup keterbatasan pendanaan, kesenjangan pengetahuan, lemahnya koordinasi, dan sulitnya menjaga program setelah intervensi proyek berakhir. Oleh karena itu, pembahasan peluang dan tantangan tidak boleh dipisahkan. Sebuah desa dapat memiliki sumber daya alam dan semangat gotong royong, tetapi keduanya tidak otomatis menghasilkan ketahanan iklim apabila tidak diterjemahkan menjadi kelembagaan, pembagian peran, dukungan anggaran, dan mekanisme evaluasi.[4]

Kearifan lokal menyediakan pijakan penting untuk merancang respons yang kontekstual. Di Banyuwangi, praktik masyarakat Osing dalam konservasi sumber daya air menunjukkan bahwa pengetahuan, norma, ritual, dan organisasi sosial dapat membentuk cara masyarakat

[2] Bevaola Kusumasari, "Climate Change and Agricultural Adaptation in Indonesia," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2016): 243–53, https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1841.
[3] Tom Selje et al., "Community-Based Adaptation to Climate Change: Core Issues and Implications for Practical Implementations," *Climate* 12, no. 10 (2024): 155, https://doi.org/10.3390/cli12100155.
[4] Anis Qomariah et al., "Community-Based Adaptation: Challenge and Opportunity in Indonesia," *E3S Web of Conferences* 317 (2021): 01075, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701075.

merawat mata air dan mengendalikan pemanfaatannya.[5] Pengalaman tersebut tidak dapat disalin secara mekanis ke setiap desa, tetapi memperlihatkan bahwa pengelolaan air selalu memiliki dimensi sosial dan kebudayaan. Literatur tentang literasi iklim berbasis kearifan lokal juga menekankan bahwa praktik tradisional dapat menjadi pintu masuk untuk menjelaskan perubahan iklim dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman masyarakat, selama pengetahuan lokal tetap dipertemukan secara kritis dengan informasi ilmiah.[6]

Selain sebagai persoalan ekologis dan pembangunan, perubahan iklim merupakan persoalan etis dan keagamaan. Kerusakan lingkungan memengaruhi kemampuan manusia memperoleh air, pangan, kesehatan, keamanan, dan penghidupan. Dalam masyarakat Muslim, tanggung jawab ekologis dapat dibaca melalui gagasan manusia sebagai khalīfah, alam sebagai amanah, keseimbangan sebagai mīzān, larangan pemborosan atau isrāf, dan larangan membuat kerusakan di bumi. Perspektif syariah kontemporer menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kondisi yang menopang tujuan-tujuan dasar hukum Islam, sebab degradasi ekologis mengancam kebutuhan primer manusia dan makhluk hidup lainnya.[7]

Maqāṣid al-sharīʿah menawarkan kerangka untuk menghubungkan nilai keagamaan dengan dampak konkret kebijakan dan tindakan. Kerangka klasik menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kontemporer, perlindungan lingkungan atau ḥifẓ al-bīʾah dipandang sebagai dimensi lintas sektoral karena keberlanjutan lingkungan merupakan prasyarat bagi terlindunginya kehidupan, kesehatan, pangan, harta, dan generasi. Dengan demikian, maqāṣid tidak diposisikan sebagai label normatif setelah tindakan dirumuskan, tetapi sebagai perangkat untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat, risiko apa yang dicegah, sumber daya apa yang dilindungi, dan apakah tindakan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.[8]

Keterhubungan antara maqāṣid al-sharīʿah dan fikih lingkungan semakin relevan dalam pembahasan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang menghasilkan manfaat ekonomi tetap dibatasi oleh kewajiban mencegah kerusakan,

---

[5] Sumarmi, "Local Wisdom of Osing People in Conserving Water Resources," *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 7, no. 1 (2015): 43–51, https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3429.

[6] Andrean Ardhitya Firnadi, "Integrating Local Wisdom into Climate Literacy: Cultural Practices and Climate Resilience in Indonesia," *Journal of Geographical Sciences and Education* 3, no. 2 (2025): 141–54, https://doi.org/10.69606/geography.v3i2.225.

[7] Norita Mohd Nasir et al., "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective," *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022): 211–31, https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10.

[8] Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413.

menghindari eksploitasi berlebihan, dan menjaga hak generasi berikutnya. Kerangka tersebut memperluas pembahasan adaptasi dan mitigasi: tindakan seperti konservasi air, diversifikasi tanaman, agroforestri, penghijauan, dan pengelolaan limbah tidak semata-mata dinilai berdasarkan efisiensi teknis, tetapi juga berdasarkan kemaslahatan sosial-ekologis yang dihasilkan.[9]

Etika lingkungan Islam juga menggeser relasi manusia dengan alam dari dominasi menuju penatalayanan. Konsep khalīfah tidak memberi lisensi untuk mengeksploitasi bumi, melainkan mengandung kewajiban akuntabilitas. Prinsip keseimbangan menuntut agar kebutuhan manusia dipenuhi tanpa merusak kemampuan ekosistem untuk pulih. Dengan pendekatan ini, perilaku ekologis bukan tambahan bagi kesalehan sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab keagamaan yang dapat diwujudkan melalui tindakan rumah tangga, pertanian, kelembagaan desa, dan kebijakan publik.[10]

Penggunaan maqāṣid untuk membaca masalah kontemporer membutuhkan pendekatan yang terbuka, sistemik, dan berorientasi tujuan. Pergeseran dari perlindungan yang semata-mata individual menuju kemaslahatan publik memungkinkan maqāṣid digunakan untuk menganalisis perubahan iklim, ketahanan pangan, akses air, serta keadilan antargenerasi. Namun, perlu dihindari kecenderungan memperluas maqāṣid tanpa prosedur analisis yang jelas. Setiap kategori harus dihubungkan dengan data lapangan, mekanisme sebab-akibat, kelompok yang terdampak, serta kemungkinan manfaat dan mudaratnya.[11]

Desa Barurejo menjadi konteks yang penting untuk menguji hubungan tersebut. Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada 25 Februari 2025 mempertemukan 20 peserta dari unsur pemerintah desa, kepala dusun, kader, PKK, kelompok pemuda, pelaku UMKM, dan masyarakat. Forum tersebut mengidentifikasi perubahan pola musim, kekeringan, banjir, peningkatan hama, serta penurunan produktivitas lahan. Peserta juga merumuskan pemanfaatan belik, efisiensi air, diversifikasi tanaman, peningkatan kapasitas petani, agroforestri, penghijauan, dan pengolahan limbah organik sebagai arah tindakan lokal.[12]

[9] R. Wahyu Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–59.
[10] Nasir Hassan Wani and Areesha Azhar, "Islamic Environmental Ethics: Preserving the Sacred Balance," *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 3 (2024): 1–8, https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20924.
[11] Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah Dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.
[12] Laporan FGD Renaksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Banyuwangi: Peace Village, 2025).

Desa Barurejo merupakan desa di Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi bagian selatan. Profil resmi desa mencatat lima dusun, yaitu Krajan, Senepolor, Seneposari, Sumberurip, dan Sumbermanggis. Wilayahnya mencakup kawasan permukiman, pertanian, hutan, dan perairan. Karakter tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan pengelolaan lahan dan sumber air. Karena itu, perubahan musim, kekeringan, dan hujan ekstrem berpotensi memengaruhi bukan hanya kondisi lingkungan, tetapi juga kegiatan pertanian dan penghidupan rumah tangga.[13]

Hasil FGD memperlihatkan adanya jarak antara gagasan dan implementasi. Desa memiliki potensi sumber air lokal, lahan penghijauan, pengalaman pertanian, kelompok sosial, dan peluang kemitraan. Pada saat yang sama, masyarakat menghadapi keterbatasan kesadaran, partisipasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi, dan mekanisme pengawasan. Jarak inilah yang menjadi fokus artikel. Penelitian terdahulu umumnya membahas adaptasi pertanian, partisipasi program iklim, kearifan lokal, atau etika lingkungan Islam secara terpisah. Masih terbatas kajian yang membaca peluang dan tantangan rencana aksi iklim pada tingkat desa dengan menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka interpretasi atas kemaslahatan sosial-ekologis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dirumuskan masyarakat Desa Barurejo; kedua, menganalisis peluang dan tantangan implementasinya; ketiga, menafsirkan tindakan tersebut melalui dimensi maqāṣid al-sharī'ah; dan keempat, menawarkan model penguatan aksi iklim desa berbasis kemaslahatan sosial-ekologis. Kebaruan artikel terletak pada integrasi antara pengalaman iklim lokal, pengetahuan dan sumber daya desa, analisis implementasi, serta maqāṣid sebagai alat untuk menghubungkan perlindungan kehidupan, mata pencaharian, pengetahuan, generasi, dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu konteks yang dibatasi oleh lokasi, kegiatan, peserta, dan waktu, yaitu FGD rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Desa Barurejo. Desain tersebut memungkinkan peneliti mempertahankan keterkaitan antara pengalaman warga, sumber daya lokal, relasi kelembagaan, dan nilai keagamaan, tanpa melepaskan temuan dari konteks terbentuknya data. Dalam penelitian kualitatif, studi kasus tepat digunakan ketika

[13] Pemerintah Desa Barurejo. "Profil Wilayah Desa." 7 April 2022. https://barurejo.desa.id/artikel/2022/04/07/profil-wilayah-desa.

pertanyaan penelitian menekankan bagaimana suatu proses berlangsung dan mengapa peluang tertentu belum otomatis menjadi tindakan yang berkelanjutan.[14]

Data utama penelitian merupakan pandangan kolektif yang diproduksi melalui FGD, kerja kelompok, presentasi kelompok, dan dokumentasi kegiatan. FGD relevan untuk menggali pengalaman, kesepakatan, perbedaan penekanan, dan prioritas tindakan yang muncul melalui interaksi antarpeserta. Pada saat yang sama, data FGD perlu dibaca secara hati-hati karena pendapat yang dominan dalam forum belum tentu mewakili seluruh penduduk desa, sedangkan dinamika kelompok dapat memengaruhi isu yang lebih banyak atau lebih sedikit dibicarakan.[15]

Tabel 1. Konteks dan Sumber Data Penelitian

Unsur	**Keterangan**
Lokasi dan waktu	Balai Desa Barurejo, 25 Februari 2025
Peserta masyarakat	20 orang: 14 perempuan dan 6 laki-laki
Representasi	Pemerintah desa, kepala dusun, kader, PKK, pemuda, UMKM, KPM, dan anggota masyarakat
Proses	Pemaparan materi, diskusi pleno, kerja tiga kelompok, presentasi, dan perumusan tindak lanjut
Dokumen	Laporan FGD, catatan proses, susunan peserta, hasil identifikasi tren iklim, rencana adaptasi, rencana mitigasi, peluang, tantangan, dan rekomendasi

Sumber: diolah dari laporan FGD rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Desa Barurejo.

Desa Barurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Siliragung yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi. Profil wilayah desa menunjukkan bahwa ruang geografis Barurejo mencakup kawasan permukiman, pertanian, hutan, dan perairan. Secara administratif, wilayah Barurejo terdiri atas lima dusun, yaitu Krajan, Senepolor, Seneposari, Sumberurip, dan Sumbermanggis. Karakter wilayah tersebut memperlihatkan kuatnya keterhubungan kehidupan masyarakat dengan sumber daya alam, terutama lahan pertanian dan sumber air. Kondisi ini menjadikan perubahan pola musim, kekeringan, hujan ekstrem, gangguan ketersediaan air, serta penurunan produktivitas pertanian sebagai persoalan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

[14] Pamela Baxter and Susan Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers," *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–59, https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573.

[15] Tobias O. Nyumba et al., "The Use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation," *Methods in Ecology and Evolution* 9, no. 1 (2018): 20–32, https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860.

Konteks ekologis dan agraris tersebut penting dalam memahami pilihan adaptasi dan mitigasi yang muncul dalam FGD. Pemanfaatan sumber air lokal (*belik*), efisiensi irigasi, diversifikasi tanaman, agroforestri, penghijauan, serta pengelolaan bahan organik bukan merupakan pilihan yang berdiri terpisah dari karakter desa, tetapi berkaitan dengan sumber daya, pengalaman pertanian, dan bentuk kerentanan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, Desa Barurejo menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana respons terhadap perubahan iklim dirumuskan dari pengalaman lokal dan selanjutnya dibaca melalui perspektif *maqāṣid al-shari'ah*.

Proses FGD terdiri atas empat tahap. Pertama, peneliti menjelaskan konsep perubahan iklim, penyebab, dampak, serta perbedaan adaptasi dan mitigasi. Kedua, peserta mendiskusikan perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap pertanian. Ketiga, peserta dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok identifikasi tren musim dan bencana, kelompok penyusunan rencana adaptasi, dan kelompok penyusunan rencana mitigasi. Keempat, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dan menyepakati tindak lanjut. Artikel ini mengolah laporan kegiatan tersebut sebagai korpus data utama dan memadukannya dengan literatur akses terbuka untuk memperkuat interpretasi, bukan untuk menggantikan suara lapangan.

Analisis dilakukan secara tematik. Tahap pertama adalah membaca keseluruhan laporan dan memisahkan pernyataan yang berkaitan dengan: (1) perubahan iklim yang dirasakan; (2) dampak ekologis, ekonomi, dan sosial; (3) tindakan adaptasi; (4) tindakan mitigasi; (5) peluang implementasi; (6) tantangan implementasi; dan (7) rekomendasi kelembagaan. Tahap kedua adalah mengelompokkan kode-kode yang memiliki makna serupa.Tahap ketiga adalah meninjau hubungan antar-tema dan menghindari duplikasi antara peluang, kapasitas, serta usulan tindakan. Tahap keempat adalah menginterpretasikan tema menggunakan maqāṣid al-sharī'ah. Prosedur ini mengikuti prinsip analisis tematik yang menuntut keterlacakan antara data, kode, tema, dan penafsiran.[16]

Kerangka analisis menggunakan lima perlindungan dasar dan satu perluasan ekologis. Pertama, ḥifẓ al-nafs digunakan untuk membaca perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, air, dan pangan. Kedua, ḥifẓ al-māl digunakan untuk menilai perlindungan lahan, hasil panen, pendapatan, dan aset produktif. Ketiga, ḥifẓ al-'aql digunakan untuk membaca pendidikan iklim, akses informasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Keempat, ḥifẓ al-nasl digunakan untuk

[16] Lorelli S. Nowell et al., "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria," *International Journal of Qualitative Methods* 16 (2017): 1–13, https://doi.org/10.1177/1609406917733847.

menilai keberlanjutan sumber daya dan dampak terhadap generasi berikutnya. Kelima, ḥifẓ al-dīn dipahami sebagai aktualisasi amanah, khalīfah, mīzān, serta larangan fasād dan isrāf. Keenam, ḥifẓ al-bī'ah digunakan sebagai kategori integratif untuk menilai keberlanjutan ekosistem yang menopang lima tujuan lainnya.

Analisis maqāṣid dilakukan pada tiga tingkat. Tingkat pertama mengidentifikasi kebutuhan atau risiko yang hendak dilindungi. Tingkat kedua menilai cara kerja tindakan adaptasi atau mitigasi dalam mengurangi risiko tersebut. Tingkat ketiga menilai prasyarat implementasi agar kemaslahatan tidak berhenti sebagai rencana. Dengan cara ini, pemetaan maqāṣid tidak didasarkan pada kemiripan istilah, melainkan pada hubungan substantif antara masalah, tindakan, manfaat, kelompok penerima manfaat, dan keberlanjutan hasil.

HASIL

Pengalaman Masyarakat Atas Perubahan Pola Musim

Peserta FGD mengidentifikasi perubahan pola musim sebagai bentuk paling mudah dikenali dari perubahan iklim. Dalam ingatan kolektif mereka selama kurang lebih satu dekade, musim hujan cenderung lebih pendek, sedangkan musim kemarau dirasakan lebih panjang dan panas. Ketidakpastian tersebut memengaruhi kemampuan petani menentukan waktu tanam. Hujan tidak hanya dipersoalkan dari sisi jumlah, tetapi juga distribusi dan intensitasnya: periode kering dapat berlangsung lama, kemudian diselingi hujan ekstrem yang memicu banjir. Kelompok identifikasi tren iklim juga mencatat kekeringan parah dan gagal panen di beberapa wilayah.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim dipahami melalui indikator yang berhubungan langsung dengan kehidupan: panas, ketersediaan air, waktu tanam, pertumbuhan tanaman, hama, banjir, dan hasil panen. Bahasa pengalaman membuat isu iklim lebih konkret daripada istilah emisi atau suhu rata-rata global. Namun, pengalaman lokal juga memiliki keterbatasan karena dapat dipengaruhi oleh ingatan, perubahan tata guna lahan, kondisi irigasi, dan faktor produksi lainnya. Oleh sebab itu, pengetahuan lokal berguna untuk mendeteksi masalah dan merumuskan pertanyaan, sedangkan verifikasi ilmiah membutuhkan data iklim dan pertanian yang lebih sistematis.

Pola serupa ditemukan dalam penelitian adaptasi pertanian di Jawa Tengah, ketika petani menghubungkan perubahan iklim dengan ketidakpastian musim, perubahan curah hujan, suhu, dan gangguan produksi. Persepsi tersebut menjadi dasar bagi tindakan adaptasi, tetapi tidak selalu menghasilkan respons yang sama karena kapasitas, pengetahuan, aset, dan akses layanan

setiap petani berbeda.[17] Dalam konteks Barurejo, FGD menghasilkan pemahaman kolektif awal, tetapi pengembangan program perlu memetakan variasi kerentanan antardusun, jenis komoditas, akses air, skala lahan, dan kondisi rumah tangga.

Dampak Ekologis, Ekonomi, dan Sosial

Dampak ekologis yang paling menonjol adalah keterbatasan air saat kemarau, banjir pada saat hujan ekstrem, meningkatnya suhu, serta gangguan terhadap kesuburan dan produktivitas lahan. Perubahan kondisi air menempatkan sumber air alternatif sebagai kebutuhan mendesak. Banjir dan kekeringan menunjukkan bahwa persoalan desa bukan sekadar kekurangan atau kelebihan air, tetapi kemampuan menyimpan, mengalirkan, membagi, dan melindungi sumber air sepanjang musim. Karena itu, adaptasi air memerlukan kombinasi konservasi sumber, efisiensi penggunaan, perbaikan infrastruktur, dan aturan sosial mengenai akses.

Dampak ekonomi muncul melalui peningkatan risiko produksi. Serangan hama yang lebih banyak, turunnya produktivitas, dan gagal panen dapat mengurangi pendapatan sekaligus meningkatkan biaya input. Bagi rumah tangga yang bergantung pada pertanian, kerugian tidak berhenti pada satu musim tanam; kerugian dapat memengaruhi kemampuan membeli benih, membayar tenaga kerja, memenuhi kebutuhan pendidikan, dan mempertahankan aset. Literatur adaptasi pertanian di Indonesia menegaskan bahwa kemampuan petani untuk menyesuaikan diri sangat terkait dengan akses terhadap informasi, kredit, kelompok tani, penyuluhan, dan pilihan teknologi.[18]

Dampak sosial belum dibahas secara rinci dalam laporan FGD, tetapi dapat dikenali melalui implikasi masalah yang dirumuskan peserta. Kelangkaan air meningkatkan beban pengelolaan rumah tangga dan dapat menimbulkan ketimpangan akses. Penurunan hasil pertanian memperbesar kerentanan kelompok dengan aset terbatas. Kebutuhan akan edukasi dan kelompok kerja menunjukkan bahwa respons individu dianggap tidak cukup. Dengan demikian, perubahan iklim berpotensi memperbesar kerentanan yang telah ada apabila program tidak memprioritaskan rumah tangga petani kecil, perempuan, kelompok berpendapatan rendah, dan wilayah yang paling sulit memperoleh air.

[17] Andung Bayu Sekaranom et al., "Agricultural Climate Change Adaptation in Kebumen, Central Java, Indonesia."
[18] Bevaola Kusumasari, "Climate Change and Agricultural Adaptation in Indonesia."

Tabel 2. Temuan iklim lokal, dampak, dan arah respons

Temuan	Dampak yang dirasakan	Arah respons
Musim hujan lebih pendek dan tidak menentu	Kesulitan menentukan waktu tanam; 770órum770 kekurangan air	Informasi musim, penyesuaian kalender tanam, dan efisiensi irigasi
Kemarau lebih panjang dan panas	Kekeringan, tekanan pada tanaman, dan penurunan hasil	Pemanfaatan belik, konservasi air, dan tanaman lebih tahan
Hujan ekstrem	Banjir dan gangguan lahan pertanian	Pemantauan risiko, pengelolaan aliran air, dan penghijauan
Hama meningkat	Biaya dan risiko produksi bertambah	Peningkatan kapasitas petani dan praktik pertanian berkelanjutan
Produktivitas menurun/gagal panen	Pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga terancam	Diversifikasi tanaman, agroforestri, dan dukungan kelembagaan

Sumber: hasil analisis laporan FGD Desa Barurejo.

Rencana Aksi Adaptasi

Rencana adaptasi pertama adalah pemanfaatan belik sebagai sumber air alternatif pada musim kemarau. Usulan ini lahir dari pengenalan terhadap sumber daya yang telah diketahui masyarakat. Belik tidak hanya dipandang sebagai titik pengambilan air, tetapi sebagai bagian dari 770órum770k sosial-ekologis yang membutuhkan perlindungan daerah resapan, kebersihan, pengaturan penggunaan, dan pemeliharaan akses. Apabila pemanfaatan hanya berfokus pada pengambilan air tanpa konservasi, tekanan terhadap sumber dapat meningkat. Karena itu, pemanfaatan belik perlu didahului pemetaan debit musiman, kualitas air, pengguna, status lahan, serta risiko konflik atau penurunan sumber.

Rencana kedua adalah peningkatan efisiensi irigasi dan penggunaan air. Arah ini relevan karena kekeringan tidak selalu dapat diatasi dengan menambah sumber air. Pengurangan kehilangan air, penyesuaian jadwal, pemeliharaan saluran, dan kesepakatan pembagian air dapat menghasilkan manfaat yang lebih cepat. Namun, efisiensi teknis perlu disertai tata kelola. Tanpa aturan yang jelas, perbaikan saluran dapat lebih banyak menguntungkan lahan yang berada di posisi tertentu atau petani dengan akses lebih kuat.

Rencana ketiga adalah diversifikasi tanaman dan pemilihan jenis yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Diversifikasi berfungsi menyebarkan risiko, karena kegagalan satu komoditas tidak langsung menghilangkan seluruh sumber pendapatan atau pangan. Kajian terhadap petani sayuran Indonesia menunjukkan bahwa strategi adaptasi dipengaruhi oleh pengetahuan,

pengalaman, akses informasi, kelompok tani, penyuluhan, dan kredit. Pertanian organik dapat menjadi salah satu alternatif, tetapi tidak otomatis lebih mudah diterapkan karena memerlukan pengetahuan, pasar, bahan input, dan masa transisi.[19]

Rencana keempat adalah peningkatan kapasitas petani melalui edukasi pertanian berkelanjutan. Usulan ini mencakup pemahaman perubahan pola musim, pengelolaan air, pengurangan ketergantungan pupuk kimia, dan pengembangan praktik yang menjaga kesuburan tanah. Kegiatan edukasi sebaiknya tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menggunakan demplot, pencatatan hasil, pertukaran pengalaman, dan pendampingan satu musim tanam. Dengan cara tersebut, pengetahuan dapat diuji berdasarkan kondisi lahan dan kemampuan petani.

Rencana kelima adalah agroforestri. Peserta menempatkan agroforestri sebagai cara menjaga kesuburan tanah sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap cuaca ekstrem. Sistem ini berpotensi memperbaiki tutupan lahan, menyediakan hasil yang beragam, dan mengurangi risiko erosi, tetapi desainnya harus disesuaikan dengan komoditas, kepemilikan lahan, kebutuhan cahaya, ketersediaan air, dan horizon keuntungan petani. Keseluruhan usulan adaptasi menunjukkan orientasi pada penguatan daya tahan, bukan sekadar respons darurat.[20]

Rencana Aksi Mitigasi

Mitigasi pertama yang dirumuskan adalah penghijauan desa, terutama pada area rawan kekeringan. Penanaman pohon dipahami sebagai upaya memperbaiki lingkungan sekaligus menyerap karbon. Namun, keberhasilan penghijauan tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Program memerlukan kesesuaian jenis, ketersediaan air pada masa awal, status lahan, tanggung jawab pemeliharaan, tingkat hidup tanaman, dan fungsi yang diharapkan. Pendekatan berbasis komunitas diperlukan agar penanaman tidak menjadi kegiatan seremonial.

Mitigasi kedua adalah pengurangan pupuk kimia dan peralihan bertahap menuju pupuk organik. Usulan tersebut berhubungan dengan kekhawatiran terhadap kualitas tanah dan emisi dari kegiatan pertanian. Implementasinya membutuhkan pengetahuan mengenai dosis, kebutuhan unsur hara, kualitas bahan organik, pengendalian hama, serta konsekuensi terhadap hasil. Peralihan yang terlalu cepat tanpa dukungan teknis dapat meningkatkan risiko produksi.

[19] Irham et al., "Climate Change Adaptation Strategies by Indonesian Vegetable Farmers: Comparative Study of Organic and Conventional Farmers," *The Scientific World Journal* 2022 (2022): 1–13, https://doi.org/10.1155/2022/3590769.
[20] Laporan FGD Renaksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Banyuwangi: Peace Village, 2025)

Oleh karena itu, pendekatan bertahap melalui uji petak, pencatatan biaya dan hasil, serta dukungan penyuluhan lebih sesuai daripada larangan yang tidak disertai alternatif.

Mitigasi ketiga adalah pengelolaan limbah organik menjadi kompos. Tindakan ini memiliki manfaat ganda: mengurangi sampah yang membusuk tanpa pengelolaan dan menyediakan input bagi pertanian. Akan tetapi, rantai pengelolaannya perlu dijelaskan, mulai dari pemilahan di rumah tangga, pengumpulan, lokasi pengomposan, tenaga pengelola, standar kematangan kompos, hingga pengguna akhir. Pengalaman program iklim di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi warga dan kejelasan pengelolaan lokal merupakan faktor penting bagi keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi.[21]

Peserta juga menyebut kampanye kesadaran lingkungan dan penggunaan energi alternatif sebagai arah mitigasi. Dua gagasan tersebut masih berada pada tingkat umum. Kampanye perlu diterjemahkan menjadi perilaku sasaran, kelompok sasaran, media, pelaksana, dan indikator perubahan. Energi alternatif membutuhkan kajian kebutuhan dan kelayakan, karena tidak semua teknologi sesuai dengan kemampuan pemeliharaan dan pembiayaan desa. Temuan FGD dengan demikian menunjukkan bahwa mitigasi telah dipahami secara luas, tetapi kesiapan implementasi setiap tindakan berbeda.

Peluang Implementasi

Peluang pertama berasal dari sumber daya alam dan pengetahuan lokal. Keberadaan belik menyediakan titik awal bagi adaptasi air. Lahan yang dapat dihijaukan dan pengalaman pertanian menyediakan ruang bagi agroforestri, diversifikasi, dan pengelolaan tanah. Nilai peluang tersebut tidak hanya terletak pada keberadaan fisik sumber daya, tetapi pada pengetahuan masyarakat mengenai lokasi, sejarah penggunaan, perubahan debit, jenis tanaman, dan aturan tidak tertulis yang menyertai pemanfaatannya.

Peluang kedua adalah modal sosial. Komposisi FGD memperlihatkan keberadaan pemerintah desa, kepala dusun, kader, kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku ekonomi lokal. Jaringan tersebut dapat mendukung penyebaran informasi, mobilisasi tenaga, pemantauan, serta pembagian peran. Penelitian tentang adaptasi pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa modal sosial dan modal manusia bersama-sama memengaruhi kemampuan petani mengembangkan respons lokal. Jaringan tanpa pengetahuan dapat menghasilkan aktivitas yang

[21] Safrina Safrina et al., "Community Participation for Adaptation and Mitigation of Climate Change: Case Study the Implementation of Program Kampung Iklim (Proklim)," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 137–51, https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.945.

tidak efektif, sedangkan pengetahuan tanpa jaringan sulit diterjemahkan menjadi tindakan kolektif.[22]

Peluang ketiga adalah pengetahuan ekologis lokal sebagai sumber pembelajaran. Pengalaman membaca musim, mengelola sumber air, memilih tanaman, dan mengenali perubahan lingkungan dapat menjadi dasar penyusunan indikator lokal. Pengetahuan ini bersifat dinamis, bukan kumpulan tradisi yang beku. Ia dapat diperkuat melalui pencatatan curah hujan sederhana, kalender musim partisipatif, dokumentasi kejadian gagal panen, serta dialog dengan data ilmiah. Penelitian mengenai pengetahuan ekologis lokal di Indonesia menunjukkan potensinya untuk membuat program konservasi lebih adaptif dan kontekstual.[23]

Peluang keempat adalah kedekatan konteks Banyuwangi dengan praktik konservasi air berbasis budaya. Kajian pada masyarakat Osing memperlihatkan bahwa konservasi air dapat ditopang oleh norma, keyakinan, dan organisasi komunitas.[24] Barurejo tidak harus memiliki bentuk praktik yang sama, tetapi pelajaran pentingnya adalah bahwa perlindungan sumber air lebih kuat ketika dilekatkan pada aturan sosial, identitas lokal, dan tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek infrastruktur.

Peluang kelima adalah kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan. Pihak eksternal dapat membantu pemetaan risiko, desain teknis, pelatihan, akses pembiayaan, dan evaluasi. FGD juga menunjukkan tumbuhnya inisiatif untuk membentuk kelompok kerja desa dan menyusun tindak lanjut. Kesediaan awal ini merupakan modal, tetapi perlu segera diterjemahkan menjadi mandat, anggota, rencana kerja, anggaran, dan jadwal evaluasi agar tidak hilang setelah kegiatan selesai.[25]

Tantangan Implementasi

Tantangan pertama adalah kesadaran dan partisipasi yang belum merata. FGD telah meningkatkan perhatian peserta, tetapi peserta tidak identik dengan seluruh masyarakat desa. Sebagian warga mungkin belum melihat perubahan iklim sebagai isu mendesak, atau memahami dampaknya tetapi menghadapi prioritas ekonomi jangka pendek. Program yang menuntut

[22] Gunawan Prayitno et al., "The Role of Social and Human Capital on Climate Change Adaptation in Agricultural Activities in Indonesia," *Environmental Challenges* 21 (2025): 101353, https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101353.
[23] M. N. Rizki and D. Asteria, "Local Ecological Knowledge and Its Benefit to Conservation Programs in Indonesia," *International Journal of Conservation Science* 14, no. 4 (2023): 1527–48, https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.04.18.
[24] Sumarmi, "Local Wisdom of Osing People in Conserving Water Resources."
[25] Laporan FGD Renaksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Banyuwangi: Peace Village, 2025).

waktu, biaya, atau perubahan praktik akan sulit diterima apabila manfaatnya tidak jelas, risikonya ditanggung individu, dan hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Pemanfaatan belik, perbaikan irigasi, penghijauan, pengomposan, dan agroforestri membutuhkan biaya, lahan, tenaga, alat, dan pengetahuan. Keterbatasan tidak selalu berarti program harus menunggu pendanaan besar, tetapi membutuhkan prioritas. Desa perlu memilih tindakan berbiaya rendah dan berdampak cepat sebagai tahap awal, sambil menyiapkan kegiatan yang membutuhkan studi dan investasi lebih besar.

Tantangan ketiga adalah keberlanjutan dan konsistensi. Laporan FGD menyoroti risiko program berhenti karena kurangnya koordinasi dan pengawasan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan tahap terakhir, melainkan harus dirancang sejak awal melalui penanggung jawab, sumber pembiayaan, indikator, mekanisme laporan, dan integrasi dalam perencanaan desa. Tanpa pelembagaan, kegiatan sangat bergantung pada tokoh tertentu atau dukungan proyek eksternal.

Tantangan keempat adalah kesenjangan antara rencana umum dan desain operasional. Istilah seperti penghijauan, edukasi, pupuk organik, energi alternatif, dan pemanfaatan belik belum menjelaskan lokasi, skala, penerima manfaat, biaya, risiko, serta indikator keberhasilan. Kesenjangan ini dapat menyebabkan pemilihan kegiatan berdasarkan kemudahan seremonial, bukan kontribusinya terhadap pengurangan kerentanan. Karena itu, rencana aksi memerlukan matriks yang menghubungkan masalah, kelompok terdampak, tindakan, penanggung jawab, sumber daya, jadwal, dan ukuran hasil.

Tabel 3. Ringkasan peluang dan tantangan implementasi

Dimensi	**Peluang**	**Tantangan**
Sumber daya	Belik, lahan penghijauan, pengalaman pertanian, bahan organik	Keterbatasan dana, alat, infrastruktur, dan data teknis
Sosial	Kader, PKK, pemuda, kepala dusun, gotong royong	Partisipasi tidak merata dan manfaat belum selalu terlihat
Pengetahuan	Pengalaman musim dan pengetahuan ekologis lokal	Belum terhubung secara sistematis dengan data ilmiah dan penyuluhan
Kelembagaan	Pemerintah desa dan gagasan pembentukan kelompok kerja	Mandat, pembagian peran, anggaran, monitoring, dan regulasi belum tersedia
Kemitraan	Peluang dukungan pemerintah, LSM, kampus, dan lembaga agama	Risiko ketergantungan pada program eksternal dan terhentinya pendampingan

Sumber: hasil analisis tematik.

PEMBAHASAN

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Konteks Lokal Barurejo

Adaptasi perubahan iklim dalam konteks Desa Barurejo perlu dipahami sebagai proses penyesuaian terhadap risiko yang secara langsung dirasakan masyarakat, terutama perubahan pola musim, kekeringan, hujan ekstrem, banjir, peningkatan hama, dan penurunan produktivitas pertanian. Karena sebagian persoalan tersebut berhubungan dengan air dan kegiatan pertanian, pilihan adaptasi yang dirumuskan masyarakat cenderung berorientasi pada penguatan ketahanan sumber daya lokal. Pemanfaatan belik, efisiensi irigasi, diversifikasi tanaman, peningkatan kapasitas petani, dan agroforestri menunjukkan bahwa adaptasi tidak hanya diarahkan pada penanganan dampak setelah terjadi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ketidakpastian iklim dalam jangka panjang.

Dalam konteks yang sama, mitigasi diterjemahkan melalui tindakan yang dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Penghijauan, pengurangan penggunaan pupuk kimia, peningkatan penggunaan pupuk organik, serta pengolahan limbah organik menjadi kompos merupakan bentuk tindakan yang berpotensi mengurangi tekanan ekologis sekaligus memberikan manfaat langsung bagi kualitas tanah dan kegiatan pertanian. Karakter tersebut penting karena mitigasi pada tingkat desa tidak selalu harus dimulai dari intervensi teknologi berskala besar, tetapi dapat berkembang dari perubahan praktik produksi, pengelolaan sumber daya, dan perilaku kolektif yang realistis dilakukan masyarakat.

Dalam praktik lokal, batas antara adaptasi dan mitigasi juga tidak selalu bersifat tegas. Agroforestri, misalnya, dapat meningkatkan ketahanan lahan dan mendiversifikasi sumber penghidupan sekaligus meningkatkan tutupan vegetasi. Pengelolaan limbah organik menjadi kompos dapat mengurangi beban limbah sekaligus menyediakan bahan pembenah tanah yang mendukung ketahanan pertanian. Demikian pula perlindungan sumber air tidak hanya berfungsi menjamin ketersediaan air pada musim kering, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, respons iklim di Barurejo lebih tepat dipahami sebagai portofolio tindakan sosial-ekologis yang saling berhubungan daripada sebagai kumpulan program adaptasi dan mitigasi yang berdiri sendiri.

Pembacaan terhadap konteks lokal tersebut menjadi penting sebelum tindakan-tindakan tersebut ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, maqāṣid tidak digunakan untuk memberikan label keagamaan secara normatif terhadap program yang telah dirumuskan, tetapi sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana tindakan lokal tersebut mampu

melindungi kehidupan, penghidupan, pengetahuan, generasi mendatang, nilai keagamaan, dan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, respons adaptasi di Barurejo diarahkan pada pengelolaan air dan pengurangan risiko pertanian, sedangkan mitigasi mencakup penghijauan, penggunaan input pertanian yang lebih berkelanjutan, dan pengolahan limbah organik. Tindakan-tindakan tersebut masih berupa rencana yang dirumuskan dalam FGD dan belum seluruhnya diuji dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pembahasan maqāṣid pada bagian berikut menilai potensi manfaat serta prasyarat pelaksanaannya, bukan mengasumsikan bahwa dampaknya telah terbukti.

Aksi Iklim Sebagai Perlindungan Kehidupan dan Kebutuhan Dasar

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pemanfaatan belik, efisiensi air, dan penyesuaian pertanian terutama berkaitan dengan ḥifẓ al-nafs. Perlindungan jiwa tidak terbatas pada pencegahan kematian langsung, tetapi mencakup tersedianya syarat kehidupan yang layak: air, pangan, kesehatan, dan perlindungan dari bencana. Kekeringan mengurangi akses air dan produktivitas, sedangkan banjir ekstrem dapat merusak lahan dan fasilitas. Karena itu, adaptasi air merupakan kebutuhan dasar, bukan proyek tambahan.

Pembacaan maqāṣid menuntut agar akses terhadap manfaat diperhatikan. Pemanfaatan belik dapat dikategorikan sebagai ḥifẓ al-nafs apabila sumber tetap lestari, kualitas air terjaga, dan kelompok paling membutuhkan memperoleh akses. Apabila pengembangan sumber justru mengurangi debit, mencemari lingkungan, atau dikuasai kelompok tertentu, label perlindungan jiwa kehilangan substansi. Maqāṣid dengan demikian berfungsi sebagai kriteria evaluasi yang menghubungkan tindakan dengan keadilan distribusi dan pencegahan mudarat.

Kerusakan lingkungan dapat mengancam tingkat kebutuhan primer yang menjadi perhatian syariah. Literatur tentang keberlanjutan lingkungan dalam perspektif syariah menegaskan bahwa degradasi ekologis mengganggu kepentingan dasar manusia dan menuntut penerapan prinsip pencegahan bahaya.[26] Hal ini relevan dengan kondisi Barurejo: menjaga sumber air dan lahan bukan sekadar konservasi benda alam, tetapi menjaga sistem yang memungkinkan masyarakat bertahan.

[26] Norita Mohd Nasir et al., "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."

Perlindungan Mata Pencaharian dan Ketahanan Pangan

Diversifikasi tanaman, peningkatan kapasitas petani, irigasi efisien, agroforestri, dan perbaikan kualitas tanah dapat dibaca melalui ḥifẓ al-māl. Dalam masyarakat agraris, harta tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga tanah, tanaman, benih, alat, ternak, tenaga kerja, pengetahuan, dan jaringan pemasaran. Gagal panen dapat mengikis modal secara berlapis. Karena itu, tindakan adaptasi yang mengurangi volatilitas hasil dan menyebarkan risiko merupakan bentuk perlindungan aset produktif.

Namun, perlindungan harta tidak identik dengan mempertahankan setiap praktik yang telah ada. Apabila suatu pola produksi meningkatkan kerusakan tanah atau ketergantungan input, keberlanjutannya perlu ditinjau. Maqāṣid mendorong transformasi yang mencegah kerugian jangka panjang tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi petani. Peralihan pupuk, tanaman, atau sistem budidaya harus bertahap, berbasis bukti, dan memperhitungkan risiko transisi. Perlindungan lingkungan dan perlindungan pendapatan perlu dirancang sebagai tujuan yang saling menguatkan.

Kajian hukum Islam kontemporer menghubungkan maqāṣid dengan keadilan ekologis dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.[27] Dalam konteks Barurejo, keterhubungan itu terlihat ketika tindakan menjaga tanah, air, dan vegetasi juga dimaksudkan untuk mempertahankan hasil pertanian. Aksi iklim menjadi lebih mudah diterima apabila manfaat ekologis diterjemahkan dalam bahasa penghidupan: pengurangan biaya, stabilitas hasil, tambahan produk, atau pengurangan risiko gagal panen.

Literasi Iklim sebagai Ḥifẓ al-‘aql

FGD mengidentifikasi rendahnya kesadaran sebagai tantangan, sekaligus merekomendasikan edukasi dan sosialisasi. Dalam kerangka maqāṣid, pendidikan iklim dapat dibaca sebagai ḥifẓ al-‘aql karena melindungi kemampuan masyarakat memahami risiko, menilai informasi, dan mengambil keputusan. Perlindungan akal bukan sekadar menyediakan pengetahuan, tetapi juga mencegah keputusan yang merugikan akibat informasi yang tidak memadai.

Literasi iklim desa perlu menggabungkan tiga sumber. Pertama, pengalaman lokal mengenai musim, hama, air, dan hasil panen. Kedua, informasi ilmiah seperti prakiraan musim, data curah hujan, serta rekomendasi budidaya. Ketiga, pertimbangan sosial-ekonomi mengenai

[27] Muhamad Nurholis, “Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia’s Perspective.”

biaya, tenaga, dan pembagian risiko. Ketiganya perlu dipertemukan dalam kegiatan yang partisipatif. Pendidikan satu arah berisiko membuat masyarakat hanya menerima istilah baru tanpa memiliki alat untuk menggunakannya.

Etika lingkungan Islam dapat menyediakan bahasa moral yang memperkuat literasi tersebut. Prinsip amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab dapat menjelaskan mengapa penghematan air, pengelolaan sampah, dan perawatan tanah memiliki makna keagamaan. Kajian etika lingkungan Islam menekankan perlunya mengintegrasikan nilai keagamaan dengan tata kelola sumber daya dan praktik keberlanjutan, bukan membatasi agama pada seruan abstrak.[28]

Perlindungan Generasi dan Lingkungan

Penghijauan, agroforestri, perlindungan sumber air, pengurangan pencemaran, dan pengelolaan limbah berkaitan dengan ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-bī'ah. Ḥifẓ al-nasl menuntut agar keputusan hari ini tidak memindahkan biaya ekologis kepada generasi berikutnya. Sementara itu, ḥifẓ al-bī'ah menegaskan lingkungan sebagai objek perlindungan sekaligus sistem penopang semua tujuan syariah. Air yang rusak, tanah yang kehilangan kesuburan, dan vegetasi yang berkurang akan memperlemah kehidupan, harta, kesehatan, dan masa depan masyarakat.

Perlindungan generasi juga berkaitan dengan kelembagaan. Penanaman pohon hanya memberi manfaat jangka panjang apabila tanaman dipelihara dan ruang hidupnya dilindungi. Sumber air hanya bertahan apabila daerah resapan, kualitas air, dan aturan penggunaan dijaga. Oleh sebab itu, ḥifẓ al-nasl tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan sesaat. Ia membutuhkan kesinambungan pengetahuan, kepemimpinan, pembiayaan, dan aturan yang melampaui pergantian pengurus atau periode proyek.

Pengalaman eco-pesantren menunjukkan bahwa lembaga keagamaan dapat menjadi ruang pembentukan kesadaran dan praktik lingkungan melalui pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan pembiasaan.[29] Dalam konteks Desa Barurejo, masjid, majelis taklim, pesantren, dan tokoh agama dapat berperan sebagai mitra literasi dan mobilisasi, tetapi keterlibatan mereka perlu terhubung dengan kebutuhan teknis dan program desa. Ceramah tentang menjaga

[28] Syahrul Basri et al., "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship," *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2024): 86–93, https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342.

[29] Heri Herdiansyah et al., "Environmental Awareness to Realizing Green Islamic Boarding School (Eco-Pesantren) in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 30 (2016): 012017, https://doi.org/10.1088/1755-1315/30/1/012017.

779órum779kan lebih berdampak apabila disertai agenda konkret, misalnya perlindungan sumber air, pemilahan limbah organik, atau perawatan pohon.

Agama sebagai Modal Penguatan Kesadaran Ekologis Lokal

Dalam FGD, peserta merumuskan persoalan dan tindakan lingkungan terutama melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti ketersediaan air, kegiatan pertanian, penurunan produktivitas, penghijauan, dan pengelolaan limbah. Namun, catatan FGD belum menunjukkan bahwa peserta secara eksplisit mengaitkan tindakan tersebut dengan konsep agama tertentu. Karena itu, hubungan antara pengalaman ekologis masyarakat dan nilai Islam dalam artikel ini perlu diposisikan sebagai pembacaan analitis serta peluang penguatan program, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh warga telah menyatakan pandangan keagamaan yang sama. Nilai amanah, keseimbangan, dan larangan berbuat kerusakan dapat dihubungkan dengan persoalan konkret tersebut melalui tokoh agama, pengurus masjid, majelis taklim, pesantren, dan organisasi keagamaan. Pengajian, ceramah, atau khutbah dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi warga, dengan materi yang tetap didukung informasi teknis dari penyuluh, pemerintah, atau mitra terkait.

Data FGD dalam penelitian ini belum secara khusus dirancang untuk memetakan tingkat religiositas maupun variasi pandangan keagamaan masyarakat mengenai perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh masyarakat telah secara eksplisit menghubungkan tindakan lingkungan dengan konsep-konsep keagamaan tertentu. Meskipun demikian, tindakan yang dirumuskan masyarakat, seperti menjaga sumber air, mengurangi pemborosan air, melakukan penghijauan, memperbaiki kualitas tanah, mengurangi limbah, dan mempertahankan keberlanjutan pertanian menyediakan ruang empiris yang kuat untuk mempertemukan pengalaman ekologis masyarakat dengan nilai-nilai Islam tentang amanah, keseimbangan, larangan berbuat kerusakan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Dalam konteks masyarakat desa, nilai keagamaan memiliki potensi strategis karena pesan moral tidak hanya disampaikan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui berbagai ruang sosial-keagamaan. Tokoh agama, pengurus masjid, majelis taklim, pesantren, lembaga pendidikan Al-Qur'an, serta organisasi keagamaan dapat menjadi mitra pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam memperkuat literasi lingkungan. Peran tersebut tidak harus diwujudkan dengan membentuk kegiatan keagamaan baru, tetapi dapat dilakukan dengan memasukkan persoalan lingkungan ke dalam ruang keagamaan yang telah berjalan, seperti

pengajian, ceramah, khutbah Jumat, pendidikan pesantren, kegiatan keagamaan perempuan, dan 780órum sosial-keagamaan lainnya.

Integrasi isu lingkungan ke dalam pengajian, ceramah, atau khutbah dapat diarahkan pada persoalan yang konkret dan dekat dengan kehidupan warga. Materi mengenai amanah, misalnya, dapat dikaitkan dengan tanggung jawab memelihara sumber air bersama; larangan *isrāf* dapat dihubungkan dengan efisiensi penggunaan air dan pengurangan sampah; prinsip *mīzān* dapat dikaitkan dengan keseimbangan pemanfaatan tanah dan input pertanian; sedangkan larangan *fasād* dapat dikontekstualisasikan dalam pencegahan pencemaran, kerusakan daerah resapan, dan praktik yang menurunkan kualitas lingkungan. Pendekatan demikian membuat nilai agama tidak berhenti sebagai pesan normatif, tetapi memperoleh bentuk praksis yang dapat dipahami dan dilakukan masyarakat.

Tokoh agama dalam konteks tersebut berpotensi menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, fungsi edukatif, yaitu menerjemahkan persoalan perubahan iklim dan lingkungan ke dalam bahasa moral-keagamaan yang dekat dengan masyarakat. Kedua, fungsi mobilisasi sosial, yaitu memperkuat partisipasi masyarakat dalam tindakan kolektif seperti penghijauan, perlindungan *belik*, pengelolaan sampah organik, penggunaan pupuk secara lebih berkelanjutan, dan perawatan fasilitas air. Namun, peran keagamaan tersebut tetap perlu dipadukan dengan pengetahuan teknis dari pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, dan pihak lain agar legitimasi moral berjalan seiring dengan ketepatan tindakan ekologis.Dengan demikian, agama dapat ditempatkan sebagai salah satu modal sosial dalam penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Desa Barurejo. Potensinya bukan untuk menggantikan pendekatan ilmiah dan teknis, tetapi untuk memperkuat motivasi, legitimasi moral, dan keberlanjutan tindakan kolektif. Pada titik inilah perspektif *maqāṣid al-shari'ah* memperoleh relevansi yang lebih kontekstual, karena nilai keagamaan dihubungkan dengan perlindungan terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan keberlanjutan sistem ekologis yang menopang kehidupan.

Ḥifẓ al-dīn: Aktualisasi Amanah Ekologis

Dimensi ḥifẓ al-dīn dalam artikel ini tidak digunakan untuk menilai tingkat religiositas individu. Dimensi tersebut digunakan untuk membaca bagaimana ajaran agama dapat hadir sebagai orientasi tindakan. Q.S. al-Baqarah [2]:30 menempatkan manusia sebagai khalīfah; Q.S. al-Raḥmān [55]:7–9 menegaskan mīzān; Q.S. al-A'rāf [7]:31 melarang isrāf; dan Q.S. al-Rūm [30]:41 memperingatkan kerusakan yang muncul akibat perbuatan manusia. Rangkaian prinsip

tersebut menghubungkan iman dengan tanggung jawab menjaga kondisi yang memungkinkan kehidupan berlangsung.

Aktualisasi nilai agama memerlukan perubahan dari bahasa normatif menuju pedoman perilaku. Amanah dapat diterjemahkan menjadi kewajiban memelihara fasilitas air bersama. Mīzān dapat diterjemahkan menjadi penggunaan input pertanian secara proporsional. Larangan fasād dapat diterjemahkan menjadi pencegahan pencemaran dan perusakan daerah resapan. Larangan isrāf dapat diterjemahkan menjadi efisiensi air dan pengurangan sampah. Penerjemahan tersebut membuat nilai agama dapat diukur melalui praktik, bukan hanya melalui persetujuan verbal.

Etika lingkungan Islam menempatkan manusia sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak alam.[30] Sementara itu, fikih al-bī'ah menekankan pengelolaan sumber daya yang sejalan dengan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.[31] Kedua pendekatan ini memperkuat maqāṣid: tindakan adaptasi dan mitigasi tidak hanya dinilai dari niat baik, tetapi dari akibatnya terhadap manusia, makhluk hidup, dan kemampuan lingkungan memperbarui diri.

Peluang: Menghubungkan Sumber Daya, Pengetahuan, dan Modal Sosial

Peluang implementasi di Barurejo dapat dipahami melalui tiga modal yang saling bergantung. Modal ekologis mencakup belik, lahan, vegetasi, bahan organik, dan potensi pertanian. Modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan belajar. Modal sosial mencakup kepercayaan, jaringan, kepemimpinan, kelompok perempuan, pemuda, serta hubungan dengan pemerintah desa. Program akan lemah apabila hanya mengandalkan salah satu. Infrastruktur air tanpa aturan sosial dapat memicu ketimpangan; gotong royong tanpa pengetahuan teknis dapat menghasilkan kegiatan yang tidak efektif; pengetahuan tanpa pembiayaan sulit diterapkan.

Pengetahuan lokal perlu diperlakukan sebagai mitra dalam produksi pengetahuan, tetapi bukan sebagai sesuatu yang selalu benar atau tidak berubah. Integrasi pengetahuan lokal dan pengelolaan sumber daya dapat memperkuat strategi adaptasi dan mitigasi ketika pengalaman masyarakat dipadukan dengan pemetaan, pencatatan, dan evaluasi.[32] Pendekatan tersebut

[30] Nasir Hassan Wani and Areesha Azhar, "Islamic Environmental Ethics: Preserving the Sacred Balance."
[31] R. Wahyu Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."
[32] M. A. K. Budiman and H. Oue, "Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Forest Management for Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies: Case from Southern Slopes of Mount Slamet, Indonesia," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 31, no. 1 (2025): 41–60, https://doi.org/10.7226/jtfm.31.1.41.

menghindari dua ekstrem: mengabaikan pengalaman lokal demi teknologi eksternal, atau mengidealkan tradisi tanpa menilai kesesuaiannya dengan risiko iklim yang baru.

Peluang kolaborasi juga perlu dirancang berdasarkan fungsi. Pemerintah desa berperan mengintegrasikan program dalam perencanaan dan anggaran. Dinas atau penyuluh menyediakan informasi dan dukungan teknis. Perguruan tinggi membantu pemetaan, pengembangan indikator, dan evaluasi. LSM dapat memfasilitasi pengorganisasian dan akses jejaring. Lembaga agama memperkuat legitimasi moral dan pembelajaran. Kelompok masyarakat menjadi pelaksana sekaligus pengawas. Pembagian fungsi ini lebih penting daripada banyaknya lembaga yang disebut dalam daftar kemitraan.

Tantangan: Dari Partisipasi Menuju Pelembagaan

Partisipasi merupakan tantangan utama karena tidak semua kehadiran menghasilkan keterlibatan substantif. Partisipasi yang bermakna mencakup akses terhadap informasi, kesempatan memengaruhi keputusan, pembagian manfaat, dan kemampuan mengawasi. Pengalaman pelaksanaan Program Kampung Iklim menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berhubungan dengan kapasitas lokal, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan pengelolaan.[33] Karena itu, kelompok kerja desa perlu memiliki representasi yang jelas, termasuk petani, perempuan, pemuda, dusun yang rentan air, dan kelompok berpendapatan rendah.

Tantangan pendanaan perlu dijawab melalui tahapan. Pada tahap awal, desa dapat menjalankan pemetaan belik, kalender musim partisipatif, pemilahan limbah pada kelompok percontohan, demplot pupuk organik, dan penetapan lokasi penghijauan. Tahap berikutnya mencakup perbaikan irigasi, penguatan unit kompos, serta perluasan agroforestri. Pendekatan bertahap memungkinkan pembelajaran dan mencegah investasi pada kegiatan yang belum memiliki penanggung jawab atau bukti kelayakan.

Tantangan kelembagaan dapat diatasi melalui integrasi rencana aksi ke dalam dokumen desa. FGD merekomendasikan pembentukan tim kerja, pemantauan tren iklim, pembangunan kemitraan, dan regulasi tingkat desa.[34] Rekomendasi tersebut perlu dirumuskan menjadi keputusan yang menetapkan mandat, struktur, tugas, jadwal, sumber anggaran, dan pelaporan. Monitoring tidak hanya menghitung kegiatan, tetapi mengukur hasil: debit dan kualitas sumber

[33] Safrina Safrina et al., "Community Participation for Adaptation and Mitigation of Climate Change: Case Study the Implementation of Program Kampung Iklim (Proklim)."
[34] Laporan FGD Renaksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Banyuwangi: Peace Village, 2025).

air, luasan tanaman hidup, jumlah rumah tangga memilah limbah, pengurangan biaya input, perubahan praktik budidaya, dan kelompok yang memperoleh manfaat.

Literatur adaptasi berbasis komunitas mengingatkan bahwa program sering menghadapi masalah hubungan antarkelompok, ketergantungan pada peneliti, dan keberlanjutan setelah proyek selesai.[35] Kajian Indonesia juga menunjukkan bahwa peluang komunitas kerap berhadapan dengan tantangan koordinasi, sumber daya, dan kesinambungan.[36] Oleh sebab itu, keberhasilan Barurejo tidak dapat bergantung pada semangat awal FGD. Semangat perlu diubah menjadi rutinitas organisasi dan keputusan publik.

Model Aksi Iklim Desa Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Berdasarkan temuan dan pembahasan, artikel ini menawarkan Model Aksi Iklim Desa Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah. Model terdiri atas lima lapis. Lapis pertama adalah diagnosis risiko dan aset lokal. Desa memetakan perubahan musim, wilayah rawan, kelompok rentan, sumber air, praktik pertanian, kelembagaan, dan pengetahuan lokal. Lapis kedua adalah orientasi maqāṣid untuk menentukan manfaat yang hendak dilindungi: kehidupan, mata pencaharian, kemampuan mengambil keputusan, generasi, nilai agama, dan lingkungan.

Lapis ketiga adalah proses penguatan kapasitas melalui literasi iklim, partisipasi, demonstrasi praktik, dan kolaborasi. Lapis keempat adalah portofolio tindakan adaptasi dan mitigasi yang saling mendukung. Adaptasi mencakup air, pertanian, dan pengurangan risiko; mitigasi mencakup vegetasi, tanah, limbah, dan efisiensi sumber daya. Lapis kelima adalah pelembagaan melalui kelompok kerja, regulasi, anggaran, indikator, dan evaluasi. Hasil akhir yang diharapkan bukan sekadar terlaksananya kegiatan, tetapi terbentuknya kemaslahatan sosial-ekologis yang adil dan berkelanjutan.

Kelima lapis tersebut perlu dijalankan sebagai siklus pembelajaran kolektif, sehingga hasil evaluasi menjadi dasar pembaruan pemetaan risiko, penetapan prioritas, dan penyesuaian tindakan. Dalam siklus ini, maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, serta bagaimana dampak tindakan terhadap generasi mendatang. Sebagai contoh, konservasi air perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap ketersediaan air dan ketahanan pangan, sekaligus pemerataan akses bagi rumah tangga rentan dan petani kecil. Pelibatan pemerintah desa, tokoh agama, kelompok

[35] Tom Selje et al., "Community-Based Adaptation to Climate Change: Core Issues and Implications for Practical Implementations."
[36] Anis Qomariah et al., "Community-Based Adaptation: Challenge and Opportunity in Indonesia."

perempuan, pemuda, dan pelaku usaha lokal diperlukan agar penentuan prioritas mempertemukan pengetahuan ilmiah, pengalaman masyarakat, dan pertimbangan etis keagamaan. Ukuran keberhasilannya kemudian dapat diterjemahkan ke dalam indikator yang disepakati bersama, seperti berkurangnya gangguan penghidupan akibat perubahan musim, meningkatnya akses terhadap sumber daya, dan terjaganya fungsi ekologis desa. Melalui mekanisme tersebut, orientasi kemaslahatan memperoleh bentuk operasional yang dapat dipantau, dipertanggungjawabkan, dan diperbaiki sesuai perubahan kondisi lokal.

Tabel 4. Pemetaan aksi iklim dan dimensi maqāṣid al-sharī'ah

Aksi/isu	**Dimensi utama**	**Kriteria kemaslahatan**
Pemanfaatan belik dan efisiensi air	Ḥifẓ al-nafs; ḥifẓ al-bī'ah	Air aman, akses adil, debit dan daerah resapan terjaga
Diversifikasi tanaman dan agroforestri	Ḥifẓ al-māl; ḥifẓ al-nasl; ḥifẓ al-bī'ah	Risiko pendapatan berkurang, lahan terjaga, manfaat berjangka panjang
Pendidikan dan informasi iklim	Ḥifẓ al-'aql	Warga mampu memahami risiko dan mengambil keputusan berbasis informasi
Penghijauan	Ḥifẓ al-nasl; ḥifẓ al-bī'ah	Tanaman sesuai lokasi, dipelihara, dan memberi fungsi ekologis
Pupuk organik dan kompos	Ḥifẓ al-māl; ḥifẓ al-bī'ah	Biaya dan hasil terukur, kualitas tanah membaik, limbah berkurang
Kelompok kerja dan regulasi desa	Maṣlaḥah 'āmmah; seluruh dimensi	Tugas, anggaran, partisipasi, monitoring, dan akuntabilitas jelas
Internalisasi nilai Islam	Ḥifẓ al-dīn	Amanah, mīzān, larangan fasād dan isrāf diterjemahkan menjadi praktik

Sumber: konstruksi penulis berdasarkan temuan dan kerangka maqāṣid al-sharī'ah.

Model tersebut menghindari pemisahan kaku antara adaptasi dan mitigasi. Agroforestri, misalnya, dapat meningkatkan ketahanan lahan sekaligus menyimpan karbon. Kompos dapat mengurangi limbah sekaligus memperbaiki tanah dan mengurangi ketergantungan input. Perlindungan sumber air dapat mendukung adaptasi sambil menjaga ekosistem. Integrasi ini penting bagi desa dengan sumber daya terbatas karena satu tindakan dapat menghasilkan beberapa manfaat, asalkan risiko dan distribusi manfaatnya dinilai.

Model juga menempatkan literasi iklim berbasis budaya dan agama sebagai penghubung antara pengetahuan dan tindakan. Kajian tentang kearifan lokal dan literasi iklim menunjukkan bahwa praktik yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat meningkatkan relevansi pembelajaran.[37] Akan tetapi, narasi budaya dan agama tidak boleh digunakan untuk menutup

[37] Andrean Ardhitya Firnadi, "Integrating Local Wisdom into Climate Literacy: Cultural Practices and Climate Resilience in Indonesia."

kebutuhan data teknis. Nilai memberikan arah, pengalaman memberi konteks, sedangkan ilmu pengetahuan membantu menguji pilihan tindakan.

Akhirnya, model memerlukan evaluasi yang transparan. Analisis tematik yang dapat dipercaya menuntut jejak yang jelas antara data dan interpretasi.[38] Prinsip serupa berlaku pada program desa: keputusan, target, pelaksanaan, hasil, dan pembelajaran perlu didokumentasikan. Transparansi memungkinkan warga menilai apakah program benar-benar melindungi kelompok rentan dan lingkungan, atau hanya menghasilkan daftar kegiatan tanpa perubahan bermakna.

KESIMPULAN

FGD Desa Barurejo menunjukkan bahwa perubahan iklim dipahami masyarakat melalui perubahan pola musim, kemarau yang lebih panjang dan panas, hujan ekstrem, banjir, kekeringan, peningkatan hama, penurunan produktivitas, dan risiko gagal panen. Respons yang dirumuskan tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh tata kelola air, pertanian, pengetahuan, dan organisasi masyarakat. Strategi adaptasi meliputi pemanfaatan belik, efisiensi irigasi dan penggunaan air, diversifikasi tanaman, peningkatan kapasitas petani, serta agroforestri. Strategi mitigasi mencakup penghijauan, pengurangan pupuk kimia, penggunaan pupuk organik, pengelolaan limbah organik menjadi kompos, dan kampanye lingkungan.

Peluang implementasi berasal dari sumber daya alam lokal, pengetahuan ekologis, jaringan sosial, keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda, dukungan pemerintah desa, serta potensi kolaborasi dengan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan. Tantangan utamanya adalah kesadaran dan partisipasi yang belum merata, keterbatasan pendanaan dan infrastruktur, belum operasionalnya sebagian rencana, serta lemahnya pembagian peran, monitoring, regulasi, dan keberlanjutan program. Artinya, peluang ekologis dan sosial belum otomatis berubah menjadi kapasitas adaptif tanpa pelembagaan.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah, aksi iklim Desa Barurejo dapat dibaca sebagai perlindungan kehidupan dan kebutuhan dasar melalui ḥifẓ al-nafs; perlindungan lahan, hasil panen, dan pendapatan melalui ḥifẓ al-māl; penguatan literasi dan pengambilan keputusan melalui ḥifẓ al-ʿaql; perlindungan sumber daya bagi generasi berikutnya melalui ḥifẓ al-nasl; aktualisasi amanah ekologis melalui ḥifẓ al-dīn; serta perlindungan sistem penopang kehidupan melalui ḥifẓ al-bīʾah. Maqāṣid berfungsi paling kuat ketika digunakan untuk menilai manfaat,

[38] Lorelli S. Nowell et al., "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria."

risiko, keadilan akses, dan keberlanjutan, bukan sekadar untuk memberi label keislaman pada kegiatan.

Implikasi praktis penelitian adalah perlunya membentuk kelompok kerja desa yang representatif, menyusun pemetaan risiko dan aset, memilih kegiatan percontohan yang terukur, mengintegrasikan rencana aksi ke dalam dokumen dan anggaran desa, serta membangun sistem monitoring. Tokoh dan lembaga agama dapat memperkuat literasi dan komitmen moral, sedangkan dukungan teknis harus diperoleh dari penyuluh, pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra lain. Model aksi iklim berbasis maqāṣid yang ditawarkan menghubungkan diagnosis lokal, orientasi kemaslahatan, penguatan kapasitas, portofolio tindakan, dan pelembagaan.

Kesimpulan penelitian dibatasi oleh penggunaan satu laporan FGD sebagai sumber empiris. Temuan belum membuktikan efektivitas tindakan yang diusulkan dan belum dapat digeneralisasi kepada seluruh desa di Banyuwangi. Penelitian lanjutan perlu menambahkan wawancara mendalam, observasi, data iklim dan pertanian, pemetaan spasial, serta evaluasi implementasi. Perbandingan antardesa juga diperlukan untuk menilai bagaimana perbedaan ekologi, kelembagaan, dan praktik keagamaan memengaruhi bentuk aksi iklim berbasis maqāṣid al-sharī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Andrean Ardhitya Firnadi. "Integrating Local Wisdom into Climate Literacy: Cultural Practices and Climate Resilience in Indonesia." *Journal of Geographical Sciences and Education* 3, no. 2 (2025): 141–54. https://doi.org/10.69606/geography.v3i2.225.

Andung Bayu Sekaranom, Emilya Nurjani, and Fitria Nucifera. "Agricultural Climate Change Adaptation in Kebumen, Central Java, Indonesia." *Sustainability* 13, no. 13 (2021): 7069. https://doi.org/10.3390/su13137069.

Anis Qomariah, Hartuti Purnaweni, and Sudarno Utomo. "Community-Based Adaptation: Challenge and Opportunity in Indonesia." *E3S Web of Conferences* 317 (2021): 01075. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701075.

Bevaola Kusumasari. "Climate Change and Agricultural Adaptation in Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2016): 243–53. https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1841.

Gunawan Prayitno, Fikriyah, Achmad Tjachja Nugraha, et al. "The Role of Social and Human Capital on Climate Change Adaptation in Agricultural Activities in Indonesia." *Environmental Challenges* 21 (2025): 101353. https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101353.

Heri Herdiansyah, R. Jokopitoyo, and A. Munir. "Environmental Awareness to Realizing Green Islamic Boarding School (Eco-Pesantren) in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 30 (2016): 012017. https://doi.org/10.1088/1755-1315/30/1/012017.

Irham, Irma Audiah Fachrista, Masyhuri, and Any Suryantini. "Climate Change Adaptation Strategies by Indonesian Vegetable Farmers: Comparative Study of Organic and Conventional Farmers." *The Scientific World Journal* 2022 (2022): 1–13. https://doi.org/10.1155/2022/3590769.

Lorelli S. Nowell, Jill M. Norris, Deborah E. White, and Nancy J. Moules. "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria." *International Journal of Qualitative Methods* 16 (2017): 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847.

M. A. K. Budiman and H. Oue. "Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Forest Management for Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies: Case from Southern Slopes of Mount Slamet, Indonesia." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 31, no. 1 (2025): 41–60. https://doi.org/10.7226/jtfm.31.1.41.

M. N. Rizki and D. Asteria. "Local Ecological Knowledge and Its Benefit to Conservation Programs in Indonesia." *International Journal of Conservation Science* 14, no. 4 (2023): 1527–48. https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.04.18.

Muhamad Nurholis. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413.

Nasir Hassan Wani and Areesha Azhar. "Islamic Environmental Ethics: Preserving the Sacred Balance." *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 3 (2024): 1–8. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20924.

Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed. "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective." *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022): 211–31. https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10.

Pamela Baxter and Susan Jack. "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers." *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–59. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573.

R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–59.

Safrina Safrina, Nellyana Roesa, and Rizanna Rosemary. "Community Participation for Adaptation and Mitigation of Climate Change: Case Study the Implementation of Program Kampung Iklim (Proklim)." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 137–51. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.945.

Sumarmi. "Local Wisdom of Osing People in Conserving Water Resources." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 7, no. 1 (2015): 43–51. https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3429.

Syahrul Basri, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar. "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship." *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2024): 86–93. https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342.

Syahrul Sidiq. "Maqasid Syari'ah Dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.

Tobias O. Nyumba, Kerrie Wilson, Christina J. Derrick, and Nibedita Mukherjee. "The Use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation." *Methods in Ecology and Evolution* 9, no. 1 (2018): 20–32. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860.

Tom Selje, Lena Anna Schmid, and Boris Heinz. "Community-Based Adaptation to Climate Change: Core Issues and Implications for Practical Implementations." *Climate* 12, no. 10 (2024): 155. https://doi.org/10.3390/cli12100155.